

PELATIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA BAGI PERANGKAT DESA LUAT LOMBANG KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Natalia Parapat¹⁾ ; Safran Efendi Pasaribu²⁾ , Fikri Haikal³⁾ , Nur Atika Siregar⁴⁾

^{1,2,3,4)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
natalia.parapat@um-tapsel.ac.id

Abstract

Training on village administrative management is a strategic effort to enhance the capacity of village officials in carrying out government tasks in an orderly, transparent, and accountable manner. Luat Lombang Village, as the research site, still faces several administrative challenges, including low administrative literacy, inconsistent use of standardized formats, and weak document archiving practices. These issues affect the speed of public services and increase the likelihood of recording errors. This study aims to analyze the implementation of the training, evaluate the effectiveness of the lecture, discussion, and hands-on practice methods, and measure the improvement in participants' administrative competencies through pre-test and post-test assessments. This research employed a descriptive qualitative approach supported by observation, interviews, documentation, and a score-based evaluation instrument. The results show a significant increase in participants' administrative abilities, with an average improvement of 25 points, particularly in population administration and document management. Practice-based training proved more effective in strengthening technical skills compared to lecture-based learning alone. This finding aligns with Ramdhan et al. (2025), who emphasize that structured, practice-oriented training tailored to field needs significantly enhances the quality of village governance. Therefore, the administrative training conducted in Luat Lombang Village has contributed substantially to improving governance practices and strengthening the professionalism of village apparatus.

Keywords: Village administration, Village apparatus, Capacity building, Governance.

Abstrak

Pelatihan pengelolaan administrasi desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Desa Luat Lombang sebagai lokasi penelitian masih menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti rendahnya literasi administrasi, penggunaan format yang tidak sesuai regulasi, serta lemahnya praktik pengarsipan dokumen. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan meningkatnya potensi kesalahan pencatatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelatihan, mengevaluasi efektivitas metode ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung, serta mengetahui peningkatan kompetensi perangkat desa melalui pre-test dan post-test. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan instrumen penilaian berbasis skor. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan kemampuan administrasi perangkat desa dengan rata-rata kenaikan skor sebesar 25 poin, terutama pada aspek administrasi kependudukan dan pengelolaan dokumen. Pelatihan berbasis praktik terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa dibandingkan metode ceramah saja. Pelatihan terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pelatihan administrasi desa di Desa Luat Lombang berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme aparatur desa.

Keywords: Administrasi desa, Perangkat desa, Kapasitas aparatur, Tata kelola pemerintahan

PENDAHULUAN

Administrasi desa merupakan salah satu elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan regulasi. Administrasi yang baik akan memudahkan proses pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa. Menurut Robbins dan Coulter (2018), administrasi merupakan bagian dari fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, sehingga kemampuan administratif perangkat desa akan sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di Indonesia, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa harus mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan profesional. Namun, kemampuan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelola administrasi pemerintahan. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 memperkuat bahwa administrasi desa mencakup administrasi umum, keuangan, perencanaan, pembangunan, dan kependudukan yang semuanya harus dikelola secara tertib dan akuntabel.

Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan administrasi desa masih sering ditemukan, terutama di desa-desa pedesaan seperti Desa Luat Lombang. Rendahnya kapasitas perangkat desa dalam pemahaman regulasi, teknik penyusunan dokumen, dan keterampilan pengarsipan menyebabkan proses administrasi sering

tidak berjalan optimal. Hal ini juga ditegaskan oleh Kartono (2016) yang menyatakan bahwa lemahnya kemampuan aparat pemerintah tingkat dasar dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi publik.

Dalam konteks Desa Luat Lombang, keterbatasan pemahaman terhadap administrasi standar desa terlihat dari dokumen-dokumen yang tidak lengkap, penulisan surat resmi yang tidak sesuai format, serta pengarsipan yang belum berjalan dengan baik. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pelayanan kepada masyarakat dan tidak tertibnya pelaporan kegiatan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola desa.

Pelatihan administrasi desa merupakan salah satu strategi pemberdayaan aparat untuk meningkatkan kompetensi teknis. Menurut teori pengembangan kapasitas (*capacity building*), pelatihan mampu meningkatkan kemampuan individu dan institusi dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif (Miles & Huberman, 2014). Pelatihan juga berfungsi sebagai ruang untuk meningkatkan adaptasi perangkat desa terhadap perkembangan regulasi dan teknologi administrasi.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Ramdhan *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pelatihan administrasi yang dilakukan secara terstruktur mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa hingga 40%. Penelitian tersebut menekankan bahwa pelatihan harus mencakup praktik langsung dan simulasi penyusunan dokumen agar peserta mampu menerapkan pengetahuan secara nyata. Oleh karena itu, model pelatihan yang diterapkan dalam penelitian ini

menggabungkan ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung.

Pelatihan pengelolaan administrasi desa juga memiliki peran dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas perangkat desa. Ketika perangkat memahami standar administrasi, mereka akan lebih tertib dan transparan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, pelatihan administrasi desa tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan sistem pemerintahan desa secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas perangkat desa akan memberikan dampak positif pada pelayanan publik, efektivitas pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Mengingat peran penting administrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penelitian mengenai pelatihan pengelolaan administrasi desa bagi perangkat Desa Luat Lombang menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pelatihan, efektivitas metode yang digunakan, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan menggambarkan proses pelatihan,

respons peserta, dan hasil peningkatan kapasitas perangkat desa. Pelatihan dilakukan dengan tiga metode, yakni **ceramah** sebagai wadah penyampaian materi administrasi desa, **tanya jawab untuk** eksplorasi persoalan nyata di desa, dan **praktik** penyusunan dokumen administrasi secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi pada proses pelatihan, wawancara dengan peserta, dokumentasi, serta pre-test dan post-test berbasis skor (0–100). Selanjutnya, data di analisis menggunakan model Miles & Huberman (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Desa Luat Lombang masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola desa. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi administrasi dan literasi digital perangkat desa, terutama terkait pemahaman terhadap format administrasi standar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016.

Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan pencatatan administrasi—seperti penyusunan buku agenda, pencatatan surat masuk–keluar, pengelolaan data kependudukan, dan pendokumentasian aset desa—masih dilakukan secara manual dan tidak mengikuti pola baku. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lambat, potensi kesalahan pencatatan meningkat, dan efisiensi kerja perangkat desa dalam mengelola dokumen pemerintahan menurun.

Permasalahan ini diperburuk oleh minimnya pelatihan teknis sebelumnya, termasuk kurangnya pendampingan dari instansi terkait dalam memahami aplikasi administrasi modern yang sebenarnya mampu meningkatkan mutu pelayanan. Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil penelitian Ramdhan *et al.* (2025), yang mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas administrasi desa di berbagai wilayah Indonesia dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan tidak meratanya kompetensi aparatur desa.

Menanggapi permasalahan tersebut, tim pelaksana kegiatan merancang pelatihan pengelolaan administrasi desa yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi teknis perangkat desa, terutama dalam memahami format administrasi, menyusun dokumen secara sistematis, dan mengelola arsip pemerintahan dengan lebih tertib. Pelatihan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penggunaan format administrasi desa yang sesuai dengan Permendagri 47/2016, penyusunan dokumen administrasi secara sistematis, dan pengelolaan arsip serta dokumentasi kegiatan pemerintahan desa.

Seluruh modul disusun berdasarkan temuan awal lapangan mengenai persoalan administrasi, seperti ketidaktepatan format surat, tidak sinkronnya data kependudukan, dan belum terkelolanya buku administrasi aset desa. Pendekatan pelatihan dirancang bersifat praktis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga materi yang diberikan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Pelatihan dilaksanakan secara intensif selama dua hari pada 17 sampai

18 Juni 2022, dan berlangsung dalam beberapa sesi, yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik langsung. Pada sesi awal, peserta mendapatkan penjelasan mengenai format standar administrasi desa dan contoh dokumen resmi seperti surat keputusan kepala desa, surat keterangan, buku agenda, buku ekspedisi, dan format laporan kegiatan.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi praktik langsung yang meliputi pembuatan surat resmi, pengisian buku administrasi kependudukan, penyusunan buku agenda surat masuk–keluar, serta pengelompokan arsip sesuai jenis dokumen. Fasilitator memberikan pendampingan intensif untuk memastikan peserta memahami langkah-langkah teknis yang diperlukan. Pendekatan praktik ini sesuai dengan prinsip *experiential learning* dari Kolb (1984), yang menekankan bahwa pemahaman yang melekat akan tercapai melalui pengalaman langsung, bukan sekadar penjelasan teoritis.

Pelatihan ini diikuti oleh 18 peserta, terdiri dari perangkat desa, kepala dusun, dan staf administrasi desa. Tingkat partisipasi sangat tinggi, yang terlihat dari kehadiran penuh seluruh peserta serta antusiasme mereka dalam mengikuti setiap sesi. Bahkan beberapa perangkat desa yang sebelumnya belum pernah mengisi format administrasi tertentu menunjukkan perkembangan signifikan setelah mendapatkan bimbingan langsung selama sesi praktik.

Peserta mengikuti kegiatan dengan serius, aktif bertanya, dan terlibat dalam diskusi kelompok mengenai permasalahan administrasi yang mereka hadapi sehari-hari.

Untuk melihat dampak pelatihan secara objektif, dilakukan pre-test dan post-test menggunakan instrumen

penilaian kemampuan administrasi. Hasil penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kemampuan Administrasi Perangkat Desa Luat Lombang

Aspek Administrasi	Skor Pre-test	Skor Post-test
Administrasi Umum	60	85
Pengelolaan Dokumen	58	88
Administrasi Kependudukan	65	90
Administrasi Keuangan	62	86
Pengarsipan	63	87
Rata-rata Total	62	87

Dari Tabel 1. diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 25 poin, yang mencerminkan bahwa pelatihan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas administrasi perangkat desa. Aspek yang mengalami peningkatan tertinggi terdapat pada administrasi kependudukan dan pengelolaan dokumen, yang selama ini menjadi tugas administratif yang paling banyak dikeluhkan oleh perangkat desa karena kerumitannya.

Peningkatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ramdhan *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa metode pelatihan berbasis praktik langsung jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa, karena mampu memberikan pengalaman nyata sekaligus meningkatkan keterampilan

psikomotorik peserta.

Secara konseptual, hasil pelatihan ini juga dapat dianalisis menggunakan teori administrasi publik. Robbins & Coulter menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Pelatihan ini berhasil memperkuat kompetensi aparatur desa dalam hal pemahaman prosedur, kemampuan teknis, dan kesadaran pentingnya tertib administrasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan meningkatnya kapasitas administrasi, perangkat desa dapat menjalankan tata kelola yang lebih baik, mulai dari pencatatan kegiatan, pertanggungjawaban anggaran, hingga penyusunan laporan pembangunan. Administrasi yang lebih tertib juga berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa karena data yang digunakan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, pelatihan pengelolaan administrasi desa di Desa Luat Lombang telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa, baik secara teknis maupun kelembagaan. Implementasi teknik pencatatan yang lebih rapi, penggunaan format standar, serta kemampuan mengarsipkan dokumen dengan lebih terstruktur menunjukkan bahwa pelatihan ini mampu menjawab kebutuhan nyata desa.

Selain itu, meningkatnya pemahaman perangkat desa mengenai pentingnya ketertiban administrasi menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir yang lebih profesional dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola desa

secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pelatihan pengelolaan administrasi desa di Desa Luat Lombang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi pemerintahan. Hasil dari pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata skor sebesar 25 poin, menandakan bahwa peserta memperoleh kemajuan substantif dalam penguasaan administrasi umum, administrasi kependudukan, pengelolaan dokumen, keuangan desa, dan pengarsipan. Pelatihan berbasis praktik langsung sangat efektif karena memberikan pengalaman nyata yang selaras dengan tugas peserta sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada:

1. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang sudah memberikan dana untuk penyelenggaraan PKM ini,
2. semua pihak yang terlibat, khususnya lokasi pengabdian kami, yaitu Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, K. 2016. Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu? Rajawali Press.
- Kolb, D. A. 1984. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Sage Publications.
- Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Ramdhan, W., Santoso, N., Nofriadi, dan Kartika, J. 2025. Pemberdayaan Perangkat Desa Silo Baru Melalui Pelatihan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Administrasi Desa. Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal, 8 (3); 463 - 468.
- Robbins, S. P., dan Coulter, M. 2018. Manajemen. Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.